



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN JUNI 2017**

Pendahuluan

Komnas HAM dapat dikatakan merupakan lembaga pertahanan terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Koorporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 30 Juni 2017, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **396 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kategori Berkas

No	Kategori Berkas	Jumlah
1	Berkas Kasus Baru 1x	37
2	Berkas Kasus Lanjutan	210
3	Berkas Baru 1x File	77
4	Berkas Lanjutan File	72
	Jumlah	396

2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	6	20	Kalimantan Barat	4
2	Sumatera Utara	28	21	Kalimantan Selatan	3
3	Bengkulu	2	22	Kalimantan Tengah	7
4	Jambi	2	23	Kalimantan Timur	7
5	Riau	17	24	Kalimantan Utara	
6	Sumatera Barat	19	25	Gorontalo	
7	Sumatera Selatan	8	26	Sulawesi Selatan	15
8	Lampung	6	27	Sulawesi Tenggara	2
9	Kepulauan Bangka Belitung		28	Sulawesi Tengah	9
10	Kepulauan Riau	2	29	Sulawesi Utara	5
11	Banten	12	30	Sulawesi Barat	1
12	Jawa Barat	33	31	Sulawesi Selatan Barat	
13	DKI Jakarta	95	32	Maluku	10
14	Jawa Tengah	16	33	Maluku Utara	3
15	Jawa Timur	26	34	Papua	5
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	2	35	Papua Barat	2
17	Bali	6	36	Tanpa Alamat	34
18	Nusa Tenggara Barat	3			
19	Nusa Tenggara Timur	6		Jumlah	396

3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	202
2	Subkomisi mediasi	43
3	Tim 65	1
4	Tim KZ	-
5	TIM	1
6	File	149
	Jumlah	396

4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	227
2	Tembusan	169
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	

Jumlah	396
--------	------------

5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	38
2	Pos	288
3	Fax	4
4	Email	45
5	Online	17
6	Audiensi	4
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	
Jumlah		396

6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	19
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	2
4	Hak memperoleh keadilan	108
5	Hak atas kebebasan pribadi	13
6	Hak atas rasa aman	34
7	Hak atas kesejahteraan	152
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	2
9	Hak perempuan	0
10	Hak anak	3
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	0
12	Non HAM	63
Jumlah		396

6.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	5
Lingkungan hidup	14
	19
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
	0

III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	2
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	
	2
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	76
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	6
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	23
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	3
	108
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	3
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	2
Berkumpul, berapat, dan berserikat	1
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	1
Menyampaikan pendapat di muka umum	6
Status kewarganegaraan	
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	
	13
VI. Hak atas rasa aman	
Mencari suaka	
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	4
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	6
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	3
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	11
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	10
	34
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	9
Hak atas kepemilikan tanah	67

Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	31
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	18
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	21
Hak atas kesehatan	4
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	2
	152
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	2
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil	
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	
	2
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	
	0
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	1
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	2
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	3
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	
	0
XII. Non HAM	Jumlah berkas
Non Ham	63
Jumlah Seluruh	396

7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Polri	2

2	Korporasi	3
3	Individu - Orang seorang	196
4	Individu - Anak	2
5	Individu - Perempuan	1
6	Individu - Buruh migran	1
7	Individu - Pekerja/Profesi	21
8	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
9	Individu - Narapidana	5
10	Kelompok - Masyarakat	97
11	Kelompok - Pekerja	22
12	Kelompok - Masyarakat Adat	16
13	Kelompok - Ras dan Etnis	2
14	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	2
15	Organisasi	1
16	Warga Negara Asing (WNA)	2
17	Tanpa Keterangan Pihak Korban	22

8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	
1	Pemerintah pusat (kementerian)	36
2	Pemerintah daerah	33
3	Lembaga negara (non kementerian)	5
4	Lembaga peradilan	31
5	Polri	107
6	TNI	11
7	Kejaksaan	7
8	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	4
9	Pemerintah negara lain	1
10	Korporasi	77
11	BUMN/BUMD	20
12	Lembaga pelayanan kesehatan	4
13	Lembaga pendidikan	11
14	Individu - Orang seorang	15
15	Individu - Pekerja/Profesi	1
16	Kelompok - Masyarakat	2
17	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	1
18	Organisasi	6
19	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	24